

LEO SURYADINATA

## Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia

Tulisan ini membahas peran negara dalam membentuk minoritas Tionghoa di Indonesia. Istilah "negara" atau *state* dalam bahasa Inggris digunakan di sini untuk menyebut pemerintah, birokrasi dan alat-alat negara yang lain. Fokus dari tulisan ini ditujukan pada hakikat negara dan dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap minoritas Tionghoa. Argumentasinya negara merupakan variabel utama yang menyebabkan terpisahnya orang Tionghoa di Indonesia, terutama di Jawa.

Pembahasan dibagi atas dua periode yakni masa sebelum dan sesudah Indonesia mencapai kemerdekaan. Dengan kata lain, tulisan ini membahas negara jajahan dan negara Indonesia merdeka. Dengan meninjau perkembangan sejarah, barulah dapat dipahami minoritas Tionghoa di Indonesia pada masa kini.

Etnik Tionghoa di Indonesia merupakan kelompok minoritas. Pada tahun 1930, etnik ini hanya 2,3 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Kini, kira-kira 3 persen penduduk Indonesia terdiri dari etnik Tionghoa. Studi ini lebih menitikberatkan Pulau Jawa daripada luar Jawa karena pulau tersebut merupakan pusat politik dan ekonomi Indonesia.

### NEGARA KOLONIAL DAN ETNIK TIONGHOA

Bagian ini membahas terpisahnya etnik Tionghoa sebelum Indonesia merdeka. Masalah persepsi dan kebijaksanaan pemerintah kolonial merupakan dua aspek yang dibahas dalam bagian ini.

### Etnik Tionghoa sebagai Orang Asing di Jawa

Sampai akhir abad ke-19, kebanyakan etnik Tionghoa di Jawa berasal dari Provinsi Hokkian (Fujian) di Cina Selatan. Orang "pribumi" melihat mereka sebagai orang asing dalam arti bahwa mereka adalah pendatang baru dan tergolong dalam kelompok ras yang lain, dan memeluk agama yang

berlainan. Sebelum abad ke-19, masyarakat Tionghoa di Jawa pada umumnya terdiri dari pedagang dan perajin atau tukang, dan sejumlah kecil petani. Orang Tionghoa yang berdagang dan bermukim di Jawa pada dinasti Manchu (Qing) tidak diizinkan untuk kembali ke negeri Cina. Lama-kelamaan, etnik Tionghoa ini membentuk komunitas tersendiri yang dikenal sebagai kelompok peranakan.

Berhubung sangat terbatasnya jumlah wanita Tionghoa di Jawa sebelum abad ke-19, lelaki etnik Tionghoa ada yang kawin dengan wanita pribumi, umumnya dari kelompok muslim nominal, atau yang non-muslim. Keturunan kawin campur inilah yang menghasilkan masyarakat peranakan. Pada abad ke-18, komunitas peranakan ini menjadi stabil (Skinner dalam McVey [ed.] 1963: 104). Kadar kawin campur mulai menurun secara perlahan-lahan dan akhirnya peranakan Tionghoa kawin di antara mereka sendiri. Peranakan menjadi tidak lagi menguasai bahasa Cina dan hanya bisa berbicara dengan bahasa daerah Indonesia (Suryadinata 1971a: 1). Di pesisir utara Jawa di mana banyak etnik Tionghoa tinggal, sejenis bahasa Melayu Pasar mulai berkembang sebagai *lingua franca* antara orang Tionghoa. Bahasa itu kemudian menjadi Bahasa Melayu-Tionghoa yang pada dasarnya bahasa Melayu tetapi tercampur istilah Hokkian. Sistem kekrabatan Fujian digunakan dalam masyarakat peranakan dan sebutan Hokkian pun digunakan dalam keluarga.

Adat-istiadat Hokkian mengalami perubahan dan disesuaikan dengan keadaan di Jawa. Pakaian peranakan merupakan kombinasi antara unsur Jawa dan Tionghoa. Sampai akhir abad ke-19, kaum pria peranakan masih memakai baju Cina panjang (*tengsha*) dan kopiah batok. Mereka masih memakai kuncir, dan kalau menyapa mereka bersoja. Sedangkan kaum wanita peranakan memakai baju kurung atau kebaya. Mereka mengunyah sirih. Ketika mereka menyapa, mereka berjongkok seperti wanita pribumi.<sup>1</sup> Anak-anak peranakan Tionghoa dibesarkan secara peranakan. Mereka mempertahankan nama keluarga Tionghoa dan makan daging babi. Mula-mula peranakan tidak memeluk agama yang terorganisasi (*organized religion*), tetapi kemudian satu golongan penduduk Tionghoa mengembangkan Khong Kauw Hwee atau Perkumpulan Agama Khonghucu. Namun banyak peranakan Tionghoa percaya kepada pemujaan leluhur, menyimpan altar di rumah, dan bersembahyang di klenteng.

---

<sup>1</sup> Tio Ie Soei, Lie Kim Hok. Bandung: "Good Luck", 1959, h. 14–16. Walaupun Tio menggambarkan adat-istiadat peranakan Tionghoa di Jawa Barat, sepengetahuan saya, di Jawa Tengah dan Timur, pakaian orang Tionghoa sangat mirip.

Tidak banyak yang telah ditulis mengenai pendidikan orang Tionghoa di Jawa sebelum abad ke-20. Tetapi satu hal yang rupanya bisa dipercaya bahwa tidak besar jumlah orang Tionghoa yang mampu bersekolah. Beberapa orang Tionghoa yang kaya mengundang guru-guru dari Cina untuk mengajar anak-anak mereka. Guru-guru ini mengajar bahasa Cina klasik yang sukar dipahami dan rupanya mutu bahasa Cina mereka sangat rendah. Misalnya ketika perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) didirikan pada 1900 di Batavia (Jakarta), tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan konstitusinya dari bahasa Belanda/Bahasa Melayu ke dalam bahasa Cina (Kwee Tek Hoay 1938: 475). Menurut sebuah sumber, sebelum abad ke-19, di Jawa terdapat sebuah sekolah Hokkian yang mengambil sekolah Tionghoa di Cina sebagai contohnya.<sup>2</sup> Pada pertengahan abad ke-19, gereja Kristen mulai mendirikan sekolah-sekolah swasta dan banyak anak-anak Tionghoa dikirim ke sekolah-sekolah tersebut. Kemudian anak-anak yang belajar di sekolah Kristen inilah yang menjadi pemimpin masyarakat Tionghoa di Jakarta.

Keterpisahan peranakan Tionghoa ini kemudian disalurkan ke jalan nasionalisme Tionghoa oleh elite ini dalam abad ke-20. Tiong Hoa Hwee Koan mendirikan sekolah Tionghoa di seluruh pelosok. Kebangkitan nasionalisme Tionghoa ini dibarengi dengan datangnya imigran Tionghoa baru (termasuk wanita) dan perhatian pemerintah Cina terhadap "Tionghoa perantauan", semua ini membuat masyarakat peranakan Tionghoa mengalami "pencinaan" kembali (*resinization*). Namun proses "pencinaan" kembali tidak berhasil, karena pemerintah kolonial Belanda merangkul peranakan dengan membuka sekolah-sekolah Belanda untuk anak-anak peranakan Tionghoa dan mencabut peraturan-peraturan yang tidak disukai oleh kaum Tionghoa. Akibatnya, masyarakat Tionghoa di Jawa terpecah menjadi dua kelompok yaitu peranakan yang mengandung unsur lokal tetap menjadi peranakan, dan totok yang masih berbudaya Cina tetap terpisah dari peranakan.

Meskipun secara budaya peranakan lebih dekat dengan pribumi ketimbang totok, namun kelompok pribumi menganggap kedua-duanya "asing". Walaupun orang Batak atau Ambon juga "asing" bagi orang Jawa, tetapi "keasingan" orang Tionghoa berbeda dari "keasingan" minoritas pribumi. Pertama, lain dari Batak dan Ambon, orang Tionghoa bukan saja imigran yang relatif baru, tetapi juga tidak memiliki daerah di Indonesia. Mereka tersebar di mana-mana, terutama di perkotaan. Kedua, dengan perkecualian kelompok kiri, nasionalis Indonesia sebelum Perang Dunia II

<sup>2</sup> Sekolah itu didirikan tahun 1729 tetapi kemudian ditutup karena salah kelola. Periksa De Haan, *Oud Batavia*, vol. 1, h. 506.

umumnya tidak menganggap etnik Tionghoa, baik peranakan maupun totok, sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Suryadinata 1971b: 83–94).<sup>3</sup> Sikap ini juga bisa dilihat dari daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Tidak ada seorang pun dari keturunan Tionghoa.<sup>4</sup> Ketiga, etnik Tionghoa memiliki tanah leluhur di luar Indonesia dan pemerintah Cina pada suatu masa menganggap semua orang Tionghoa warga negaranya.

### Sistem Opsir, Sistem Pemukiman dan Pas Jalan

Perbedaan etnik antara orang Tionghoa dan pribumi merupakan salah satu sebab dari terpisahnya kelompok Tionghoa. Namun tak kalah pentingnya adalah kebijaksanaan pemerintah kolonial, misalnya Sistem Opsir (Kapitan Cina), Sistem Pemukiman dan Pas Jalan, yang membuat orang Tionghoa tidak terbaaur. Apakah sebabnya pemerintah kolonial mengambil kebijaksanaan yang sedemikian. Pertama, kebijakan ini merupakan kemudahan secara administratif. Orang Tionghoa di Jawa sering memilih hidup dengan kelompoknya sendiri. Karena itu mudalah bagi Belanda untuk menunjuk kepala kelompok ras itu sendiri. Kedua, kebijakan ini menguntungkan secara ekonomis, karena akan menjamin stabilitas sosial. Di bawah sistem ini, penduduk nonpribumi bermukim di perkotaan sedangkan pribumi di pedesaan. Dilarangnya warga nonpribumi tinggal di desa diharapkan supaya mereka tidak akan mempengaruhi penduduk desa untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kegoncangan sosial. Ketiga, kebijakan ini diinginkan secara politis. Belanda percaya bahwa pemerintahan kolonial akan terancam jikalau ras yang berbeda, umpamanya orang Tionghoa dan Jawa, bergabung untuk melawan mereka. Karena politik pemisahan ini signifikan, maka penting untuk diperiksa secara teliti.

Yang pertama adalah dijalankannya sistem opsir. Sebetulnya sistem opsir ini bukan merupakan sebuah sistem dalam arti sudah dipikirkan secara terinci. Sebelum diterapkan seperti Sistem Residensi di Malaya pada zaman Inggris, sistem opsir ini dikembangkan secara lambat laun antara 1619 dan 1837.<sup>5</sup> Ketika Jan Pieterszoon Coen menaklukkan Jayakarta, ia menggunakan

<sup>3</sup> Sebagian nasionalis Indonesia yang berhaluan kiri menganggap peranakan orang Indonesia, tetapi mayoritas tidak menerima konsep ini.

<sup>4</sup> Periksa *Album 90 Pahlawan Nasional* (Jakarta: Bahtera Jaya, 1986), terutama daftar h. 97–199.

<sup>5</sup> Opsir ini memakai pangkat militer dari Sersan sampai Mayor. Sedikit sekali tulisan mengenai sistem ini, terkecuali B. Hoetik, "So Bing Kong: Het eerste hoofde der Chineezen te Batavia, 1619-1636", *BKI* 73 (1917), h. 344-416; B. Hoetink, "Nie Hoe Kong, Kapitein der Chineezen in 1740", *BKI*, 78 (1922) h. 1-38; dan Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia*

orang Tionghoa sebagai buruh dan pedagang. Orang Tionghoa ditempatkan di daerah yang jauh dari pribumi. Untuk menguasai mereka, Coen menunjuk seorang Tionghoa yang kaya, Souw Beng Kong, untuk menjadi Kapitan Cina. Sistem Kapitan ini dipinjam dari orang Portugal yang mula-mula menjalankannya di Melaka, yang kemudian juga dipakai oleh pemerintah kolonial Inggris (Wong 1963: i–iii).

Istilah *kapitein* (di Indonesia lebih dikenal dengan ejaan Kapitan) berasal dari bahasa Spanyol untuk “kapten”, tetapi tidak ada hubungannya dengan urusan militer. Kapitan adalah sebuah gelar yang diberikan kepada kepala kelompok ras. Seorang kapitan diberikan kekuasaan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur urusan kelompok ras tersebut yang berkenaan dengan agama dan adat-istiadat. Ia juga diharapkan untuk menyelesaikan pertikaian di antara kelompok rasnya sehubungan dengan hukum adat. Orang Belanda menerapkan sistem ini kepada masyarakat Tionghoa di Batavia. Pada 1619, Souw Beng Kong dipilih oleh Coen dari 400 penduduk Tionghoa yang bermukim di Batavia dan diberi kuasa untuk memerintah “ras” nya dalam urusan sipil. Namun hal-hal yang penting masih harus diserahkan kepada penguasa Belanda (Hoetink 1917: 354).

Dalam tahun 1619 penduduk Tionghoa di Batavia berjumlah 400 orang; dalam 1620 menjadi 800 orang; dan setahun kemudian, jumlah itu meningkat sampai 2.100 jiwa (Soekanto 1954: 26). Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tugas Kapitan juga bertambah. Pada tahun 1678, seorang Letnan Cina ditunjuk untuk membantu Kapitan Cina. Baru pada tahun 1937, pangkat (titel) mayor (Majoor), lebih tinggi dari kapiten diadakan. Di kota-kota besar di Jawa, Mayor Cina pun telah ditunjuk. Pada waktu itulah sistem opsir boleh dikatakan sudah lengkap. Opsir Tionghoa ini tidak digaji. Mereka adalah pedagang yang menggunakan posisi ini untuk memperbaiki bisnisnya. Mereka bekerja di kantor yang bernama Kong Koan (Gong Guan) dan berfungsi sebagai administrator. Misalnya mereka ditugaskan menjelaskan peraturan pemerintah kolonial kepada kaum Tionghoa dan memungut pajak dari orang Tionghoa.

Mula-mula opsir Tionghoa ditunjuk berdasarkan kedudukan orang tersebut dalam masyarakat Tionghoa. Tetapi pada akhir abad ke-18, situasi berubah. Ong Tae Hai yang pernah mengunjungi Pulau Jawa pada 1791, menulis dalam *Hai Tao I Tse [The Chinamen Abroad]*: “Pedagang yang kaya raya dan *big dealers* telah mengumpulkan banyak kekayaan. Karena itu, mereka menyuap orang Belanda supaya bisa ditunjuk sebagai Kapitan, Letnan,

*Boedelmeester*, Sekretaris dan titel-titel yang lain” (dikutip dari Wong 1963: 1). Pada suatu ketika, kekuasaan opsir Tionghoa itu telah melampaui batas yang diizinkan oleh orang Belanda. Pembantaian masal tahun 1740 merupakan sebuah contoh bahwa opsir Tionghoa menjadi semacam ancaman terhadap pemerintah kolonial Belanda.<sup>6</sup> Orang Belanda yang takut bahwa mereka tidak lagi bisa menguasai opsir Tionghoa akhirnya mengeluarkan peraturan untuk mengurangi kekuasaan opsir-opsir tersebut. Opsir Tionghoa hanya diberi kekuasaan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan upacara yang bersifat tradisional. Akan tetapi, pada abad ke-20, nasionalis Tionghoa menganggap opsir-opsir ini sebagai simbol kepentingan Belanda dan tidak menghormati mereka. Kemudian sistem opsir Tionghoa ini dihapuskan karena sudah tidak berguna lagi.<sup>7</sup>

Sistem yang kedua, Sistem Pemukiman (*Wijkenstelsel*), berhubungan erat dengan sistem opsir dalam arti bahwa orang Tionghoa diurus oleh kepala kelompok ras mereka dan diwajibkan untuk tinggal di daerah tertentu yang jauh dari ras lain. Sistem Pemukiman itu mula-mula diterapkan pada 1835 di Pulau Jawa. Peraturannya berbunyi: “Orang Timur Asing yang penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah pimpinan kepala mereka masing-masing” (Williams 1960: 31). Pada 1866 peraturan tersebut diubah. Pejabat setempat diberikan kekuasaan untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut jikalau mereka merasa tidak perlu. Namun pada akhir abad ke-19, Gubernur Jenderal memberikan instruksi bahwa sistem pemukiman harus dijalankan secara ketat. Orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan denda berat. Walaupun dihapus pada tahun 1920-an, peraturan itu mempunyai dampak jangka panjang untuk “keterpisahan” orang Tionghoa dari pribumi.

Sistem pemukiman itu melarang orang Tionghoa untuk hidup di antara orang pribumi dan membatasi komunikasi mereka dengan ras lain. Karena peranan Tionghoa hidup dalam “isolasi”, jadi identitasnya menjadi lebih kentara. Tidaklah mengherankan, menjelang akhir abad ke-19, banyak buku klasik Cina dan cerita rakyat Cina mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk pembaca peranan Tionghoa.<sup>8</sup> Surat kabar Belanda Indo juga

---

<sup>6</sup> Mengenai pembantaian 1740, periksa J. T. Vermuelen (diterjemahkan oleh Tan Yock Siong), “The Chinese in Batavia and the Troubles of 1740,” *Journal of South Seas Society*, Vol. IX, Part 1, Juni 1953.

<sup>7</sup> Mengenai sistem opsir, periksa Leo Suryadinata (1981a).

<sup>8</sup> Tentang studi sastra peranan pada abad ke-19, periksa Claudine Salmon, *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia* (Paris, 1981).

sering memuat cerita Cina atau cerita yang menarik para pembaca Tionghoa di Hindia Belanda.

Sistem Pemukiman mewajibkan orang Tionghoa bermukim dalam sebuah daerah dan baru boleh meninggalkan tempat tersebut kalau ada "pas jalan". Sistem Pas Jalan (*Passenstelsel*) itu secara resmi dilaksanakan pada 1863. Penduduk Timur Asing yang tinggal di Jawa dan Madura diharuskan memperoleh pas jalan yang berlaku setahun. Seorang penulis berpendapat bahwa sistem tersebut sudah dilaksanakan pada 1816. Pada tahun itu ada sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur-Jenderal yang mirip dengan sistem pas jalan (Liem Twan Djie 1974: 33). Menurut peraturan tahun 1863, pas jalan itu diberikan oleh pejabat Belanda untuk "kepentingan perdagangan dan industri atau usaha yang berguna" tetapi pas itu bisa dicabut segera "untuk kepentingan keamanan umum" (Williams 1960: 28). Pada 1897 pemerintah kolonial bermaksud mengawasi gerak-gerik orang Tionghoa secara lebih ketat, sehingga lebih sukar bagi orang Tionghoa untuk mendapat pas jalan. Ketika peraturan 1863 diterapkan kembali secara ketat pada akhir abad ke-19, orang Tionghoa diwajibkan memperoleh pas jalan setiap kali ia meninggalkan rumahnya (Williams 1960: 30).

Seperti sistem pemukiman, sistem pas jalan akhirnya juga dihapuskan setelah pergerakan Pan-Cinaisme bangkit. Namun itu tidak berarti menamatkan politik pemisahan Belanda dari penduduk pribumi. Pada 1908 pemerintah Belanda mendirikan Hollands Chinese School (HCS), sebuah sekolah Belanda khusus untuk anak-anak Tionghoa. Hal itu juga mempertebal rasa pemisahan bagi orang Tionghoa.

### Sistem Status

Sistem status ini dalam masyarakat kolonial juga mengakibatkan "keterpisahan" etnik Tionghoa. Pada masa VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), penduduk Hindia Belanda dibagi berdasarkan agama, yaitu Kristen, Islam dan non-Kristen (Gouw Giok Siong 1960: 29; Wertheim 1956: 135–6). Pembagian ini sejalan dengan pembagian ras.

VOC bubar pada akhir abad ke-18 dan pemerintah Belanda yang mengambil alih daerah dan harta VOC dalam abad ke-19 menjalankan kebijakan yang mirip. Penduduk Hindia Belanda dibagi atas empat golongan yaitu: (1) orang Eropa, (2) mereka yang disamakan dengan orang Eropa, (3) pribumi, dan (4) mereka yang disamakan dengan pribumi.<sup>9</sup> Kategori pertama,

<sup>9</sup> Gouw Giok Siong 1960: 29–33. Gouw juga berpendapat bahwa kebijakan kolonial telah membangkitkan kesadaran rasial.

orang Eropa, terdiri dari orang Belanda yang tergolong kelas penjajah. Dalam kategori kedua, orang yang disamakan dengan orang Eropa tunduk di bawah hukum untuk orang Eropa. Sedikit sekali orang Tionghoa yang dimasukkan dalam kategori ini, tetapi sejak 1889 orang Jepang dimasukkan kedalam kategori kedua. Kategori ketiga adalah pribumi Indonesia, yang dijajah oleh Belanda, sedangkan kategori keempat mencakup orang Tionghoa dan orang Asia lainnya.

Pada 1907 pemerintah Belanda melaksanakan kebijakan sistem status yang berdasarkan pada ras. Kelompok yang pertama adalah orang Eropa (yakni Belanda), kelompok kedua pribumi dan yang ketiga Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) (Wertheim 1956: 139–40; Gouw Giok Siong 1960: 30–3). Orang Eropa merupakan kelas atas, pribumi kelas bawah, dan Timur Asing (orang Tionghoa, Arab dan India yang lahir atau tinggal di Hindia Belanda selama sepuluh tahun) merupakan kelas menengah. Dalam kebijaksanaan pemerintah Belanda yang berdasarkan ras, sukar menemukan penduduk yang tidak berpikir berdasarkan ras. Dalam pembagian itu, Belanda yang paling untung, dan pribumi yang paling dirugikan. Orang Tionghoa yang ditempatkan di antara kedua kelompok ras itu merupakan kelompok yang terpisah. Mereka ingin disamakan dengan orang Eropa secara hukum. Akan tetapi pemerintah kolonial menolak. Kesadaran kelompok yang berdasarkan ras (atau etnik) merupakan suatu realitas dalam masyarakat Hindia Belanda.

### **Kebijakan Ekonomi dan Orang Tionghoa**

Keterpisahan orang Tionghoa tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi Belanda terhadap Hindia Belanda. Untuk mengetahui keadaan orang Tionghoa, kebijakan ekonomi terhadap orang Tionghoa perlu diteliti. Kedudukan ekonomi orang Tionghoa di Hindia Belanda, terutama di Jawa, bisa dibagi atas tiga babak. Babak pertama—yaitu sebelum tibanya orang Belanda—perdagangan orang Tionghoa di Jawa merupakan perdagangan internasional. Pedagang Tionghoa bertindak seperti perantara antara pedagang besar Cina dan penduduk pribumi. Akan tetapi, datangnya orang Eropa, terutama orang Belanda, telah mengubah peran orang Tionghoa.

Gubernur VOC yang pertama Coen, menjalankan kebijakan yang membatasi kongsi dagang tersebut pada “perdagangan borongan yang besar”, dengan orang Belanda sebagai pedagang perantara, tetapi membiarkan perdagangan eceran di tangan orang Tionghoa. Ini disebabkan oleh jumlah Tionghoa yang jauh lebih besar daripada Belanda. Selain itu, orang Tionghoa juga lebih mengetahui keadaan setempat. Akibatnya, orang

Tionghoa dibatasi pada perdagangan eceran dan kemudian mendominasi sektor tersebut. Selain dari itu, mereka mulai bergerak mengumpulkan produk pribumi untuk diekspor oleh VOC. Sejak masa itulah aktivitas ekonomi orang Tionghoa berubah. Dalam babak kedua ini—babak VOC—orang Tionghoa bergerak sebagai perantara antara VOC dan penduduk pribumi. Dalam periode ini, barang dagangannya yang utama pun tidak sama: dari barang-barang yang mewah dari Timur berubah menjadi produk negara-negara Barat.

Dalam babak ketiga—yaitu setelah jatuhnya VOC—posisi orang Tionghoa sebagai pedagang perantara menguat. Pada 1804, misalnya, sebuah peraturan diumumkan bahwa orang Tionghoa dan non-Kristen dilarang membawa barang langsung dari Eropa, Amerika dan Afrika ke Batavia. Peraturan itu mempunyai dampak yang besar. Pada masa itulah orang Tionghoa di Jawa menduduki posisi pertengahan antara bisnis besar Eropa dan bisnis kecil pribumi.<sup>10</sup> Pada awal abad ke-20, gerakan Pan-Cinaisme bangkit di Jawa dan orang Belanda membuat konsesi terhadap orang Tionghoa—misalnya mereka menghapuskan sistem pemukiman dan sistem pas jalan. Akhirnya kedudukan ekonomi orang Tionghoa semakin kuat.

Sistem pemukiman dan pas jalan memaksa orang Tionghoa tinggal di perkotaan. Pengumuman Undang-Undang Agraria 1870 juga membuat orang Tionghoa sukar, kalau tidak bisa dikatakan tidak mungkin, untuk menjadi petani. Semua itu membuat orang Tionghoa menjadi pedagang perantara. Orang Tionghoa adalah pengumpul pajak yang terutama melalui sistem *pachter*. Mereka menjadi pengumpul pajak dari rumah gadai, penjualan madat dan rumah judi. Pajak yang dikumpulkan melalui orang Tionghoa bertambah pada akhir abad ke-19. Di samping itu orang Tionghoa juga memperkukuh kedudukannya dalam perdagangan distributusi sehingga “semua yang dijual oleh pribumi kepada orang Eropa dijual melalui orang Tionghoa, dan semua yang dibeli pribumi dari orang Eropa dibeli melalui orang Tionghoa.”<sup>11</sup>

Banyak penulis, misalnya Liem Twan Djie, berpendapat bahwa perdagangan di Jawa sebelum tahun 1940 bisa dibagi atas bisnis besar, bisnis sedang dan bisnis kecil. Bisnis besar berada di tangan orang Eropa, bisnis sedang di tangan orang Tionghoa sedangkan bisnis kecil di tangan pribumi (Liem Twan Djie 1947: 1–15). Tidaklah benar bahwa orang Tionghoa di Jawa pada waktu itu hanya terdiri dari pedagang. Tetapi memang benar bahwa

<sup>10</sup> Studi mengenai posisi ekonomi orang Tionghoa di Indonesia sebelum Perang Dunia II, dapat diperiksa dalam Liem Twan Djie (1947)

<sup>11</sup> Kutipan yang terkenal ini diambil dari buku Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (London: Oxford University Press, 1951), h. 491.

pada tahun 1930, di antara orang Tionghoa yang berjumlah 105.455, kira-kira 57,66% berdagang.

Kampanye anti-Tionghoa di Jawa sebelum Perang Dunia II dipusatkan pada "keasingan" orang Tionghoa dan status mereka dalam bidang ekonomi. Pada 1912, misalnya, Sarekat Islam didirikan di Jawa oleh para pedagang Jawa, termasuk pedagang batik, dalam suatu usaha untuk melemahkan pengaruh ekonomi orang Tionghoa. Pada 1918 di Kudus terjadi suatu kerusuhan anti-Tionghoa di mana banyak pedagang Muslim yang berpengaruh terlibat dalam peristiwa itu. Pada 1930, Laporan Pemerintah Mengenai Industri Batik juga mengakibatkan gerakan anti-Tionghoa di Jawa Barat. Sebuah rapat protes diadakan oleh kaum wanita dan sebuah koran peranakan Tionghoa, *Sin Po*, diboikot oleh pembaca pribumi. Tidaklah bisa dinafikan bahwa ada unsur ekonomi dalam kerusuhan atau gerakan anti-Tionghoa. Namun, unsur ini tidak dapat menjelaskan bahwa gerakan anti-Tionghoa itu mempunyai pengikut yang cukup besar. Jadi, prasangka etnik di antara pribumi juga harus dipertimbangkan.

Dalam zaman penjajahan, di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya terdapat dua golongan orang Tionghoa yaitu peranakan dan totok. Ini merupakan suatu realitas. Masyarakat totok diperkuat dengan masuknya lebih banyak imigran baru sejak awal abad-20. Setelah Indonesia merdeka, imigrasi orang Tionghoa dihentikan dan masyarakat totok juga mulai berhenti berkembang. Ini merupakan faktor pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan intergrasi dan asimilasi terhadap orang Tionghoa di kemudian hari. Karena itu, orang totok Tionghoa, atau sekurangnya anak-anak mereka, mulai mengalami peranakanisasi, jikalau tidak boleh dikatakan Indonesisasi atau pribumisasi. Di Jawa, orang Tionghoa menjadi lebih homogen, yaitu mereka mulai menjadi peranakan, terutama dalam zaman Orde Baru.

#### NEGARA MERDEKA DAN MINORITAS TIONGHOA

Di sini, penting untuk mengkaji perbedaan dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia terhadap orang Tionghoa. Bila pemerintah kolonial melestarikan terpisahnya orang Tionghoa, supaya Hindia Belanda terus menjadi "masyarakat majemuk", maka pemerintah Indonesia, setelah memperoleh kemerdekaan, mencoba mengintegrasikan bahkan mengasimilasikan orang Tionghoa ke tubuh "bangsa Indonesia", yang umumnya ditafsirkan sebagai bangsa pribumi. Namun tidak berarti bahwa seluruh kebijaksanaan itu menjurus ke arah asimilasi. Pada dasarnya kebijakan pemerintah terbagi atas dua unsur yaitu asimilasi dan pemisahan.

## Kebijaksanaan Politik

Keterlibatan orang Tionghoa dalam politik Indonesia bermula sebelum Perang Dunia II. Elite peranakan Tionghoa terpecah dalam orientasi yang berbeda. Ada yang berkiblat ke Cina (Kelompok Sin Po), ada yang berorientasi ke Belanda (Chung Hwa Hui) dan ada juga yang berkiblat ke Indonesia (Partai Tionghoa Indonesia) (Suryadinata 1981: 21–84). Setelah Indonesia merdeka, politik yang berdasarkan etnisitas ini berlangsung. Di Indonesia terdapat dua organisasi sosial-politik yang penting yaitu Baperki yang didominasi oleh peranakan Tionghoa dan Qiao Zong yang dikuasai oleh tokoh Tionghoa, terutama mereka yang berwarga negara asing.

Sebelum Soeharto berkuasa, pemerintah Indonesia mentoleransi adanya organisasi sosial-politik etnik itu. Baperki yang didirikan pada tahun 1954 berusaha untuk mendapatkan persamaan antara sesama warga negara Indonesia, tanpa pandang latar belakang rasnya. Baperki berpendapat bahwa orang Tionghoa merupakan satu bagian dari suku bangsa Indonesia. Jadi, orang Tionghoa kedudukannya sama dengan suku bangsa Indonesia seperti Jawa, Sunda dan Minang. Dengan kata lain, orang Tionghoa itu tidak usah meleburkan diri kedalam masyarakat pribumi. Pada zaman Sukarno (Demokrasi Terpimpin), Baperki berkembang menjadi organisasi massa yang menitikberatkan intergrasi (politik), bukan asimilasi, di kalangan orang Tionghoa. Organisasi itu makin condong ke kiri dan mendekati Sukarno untuk mendapatkan perlindungan. Politik kiri inilah yang akhirnya membawa Baperki musnah setelah terjadinya G-30-S pada tahun 1965.

Dengan dilarangnya Baperki dan perkumpulan Tionghoa lainnya, penguasa baru mulai menyokong LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) yang ditugaskan untuk menangani masalah Tionghoa. Badan yang disokong oleh pemerintah ini menganjurkan orang Tionghoa di Indonesia berasimilasi total ke dalam masyarakat pribumi sebagai satu-satunya solusi "masalah Tionghoa". Akan tetapi kemudian LPKB dibubarkan dan di atas puingnya dibentuk Bakom atau Badan Kontak pada 1977 di bawah naungan Departemen Dalam Negeri.<sup>12</sup> Dari namanya, jelaslah bahwa Bakom berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Bakom, seperti LPKB, terus menekankan asimilasi orang Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi. Namun sejak 1987, dalam publikasi Bakom terkadang terselip konsep intergrasi nasional, bukan asimilasi. Misalnya dalam publikasi Bakom yang berjudul *Wawasan Kebangsaan Indonesia*, dimuat sebuah karangan

<sup>12</sup> Untuk diskusi singkat mengenai Bakom dan LPKB, periksa Leo Suryadinata, *Political Thinking of the Chinese Minority in Indonesia* (Singapura: Singapura University Press, 1981), "Introduction".

Profesor Harsja Bachtiar yang mengatakan bahwa di Indonesia dibolehkan identitas etnik ataupun ras di samping identitas nasional (Bachtiar 1987: 1–48). Mungkin ini merupakan reaksi terhadap timbulnya etnisitas secara global. Walaupun demikian, Bakom sendiri tidak menganjurkan liberalisasi politik etnik. Bahkan sebaliknya, pembauran merupakan tujuan Bakom yang resmi.

Sebetulnya setelah jatuhnya Sukarno, pemerintah Soeharto telah melarang semua organisasi sosial-politik Tionghoa. Ini bukan saja karena politik kiri Baperki, tetapi juga konsep “nation building” yang dianut oleh pemimpin baru Indonesia. Mereka memandang organisasi Tionghoa itu eksklusif dan ingin melihat orang Tionghoa bergabung dalam ormas yang didominasi oleh pribumi. Sejumlah kecil orang Tionghoa yang menaruh minat dalam politik ikut serta dalam organisasi asimilatif seperti Golkar partai pemerintah atau organisasi yang berafiliasi dengan Golkar. Jusuf Wanandi (Liem Bian Kie), Harry Tjan Silalahi adalah dua tokoh dari kelompok ini. Anggota DPR yang mewakili Golkar, hanya terdapat Djoko Sujatmiko (Lie Giok Hauw) seorang, sedangkan Budi Dipojuwono (Lie Po Yoe) mewakili PNI (1971–77) (Suryadinata 1978: 3–14). Kwik Kian Gie, tokoh PDI (Megawati), gagal menjadi anggota DPR pada tahun 1987.<sup>13</sup>

Sejak tahun 1966, tidak ada orang Tionghoa yang diangkat menjadi menteri kabinet, terkecuali dalam kabinet Soeharto yang terakhir (Maret 1998), yang hanya bertahan satu bulan. Menteri Tionghoa itu adalah *konco* bekas Presiden yang bernama Mohammad Bob Hasan alias The Kian Seng. Sebelumnya dalam zaman Sukarno terdapat tiga orang menteri kabinet Tionghoa yaitu Tan Kiem Liong (Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, anggota NU), Oei Tjoe Tat (Menteri Negara, anggota Partindo) dan David G. Cheng (Menteri Cipta Karya dan Konstruksi). Pada zaman Demokrasi Liberal, sekurang-kurangnya terdapat dua orang menteri Tionghoa yaitu Ong Eng Die (Menteri Keuangan, anggota PNI) dan Lie Kiat Teng (Menteri Kesehatan, anggota PSII) (Suryadinata 1981: 3, 26, 94–5, 100–1).

Politik Tionghoa pada zaman Orde Baru merupakan politik tipe “broker”. Kepentingan orang Tionghoa “diwakili” oleh beberapa “tokoh” Tionghoa yang ada hubungan dengan penguasa. Beberapa lembaga yang berhubungan dengan pemerintah atau orang pemerintah seperti Bakom dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies) sering digunakan untuk menyalurkan permintaan minoritas Tionghoa. Sistem cukong juga berupa

<sup>13</sup> Tentang Kwik Kian Gie, periksa *Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*. (Jakarta: Grafitipers, 1986), h. 428--29.

satu saluran untuk memberikan masukan kepada kebijaksanaan pemerintah. Masih perlu diperdebatkan apakah tekanan-tekanan ini efektif. Namun yang jelas pemerin-tah Soeharto tidak sudi menonjolkan orang Tionghoa sebagai "tokoh politik". Ini mungkin disebabkan oleh prasangka elite pribumi terhadap orang Tionghoa. Mungkin juga ini disengaja agar orang Tionghoa berkecimpung dalam bidang ekonomi supaya nanti bisa dijadikan kambing hitam. (Lihat bagian kebijakan ekonomi.)

### **Kebijaksanaan Kebudayaan dan Pendidikan**

Usaha yang paling jelas untuk mengasimilasikan orang Tionghoa di Indonesia tercermin dalam kebijaksanaan tentang pendidikan, bahasa dan nama Tionghoa. Mula-mula pemerintah Indonesia tidak menaruh banyak perhatian terhadap pendidikan orang Tionghoa. Tidak ada pengawasan terhadap sekolah Tionghoa. Namun setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, pemerintah mulai mencurahkan perhatiannya ke dalam bidang ini. Perlahan-lahan, pemerintah telah mengumumkan peraturan yang bertujuan mengindonesianisaikan mata pelajaran dan tenaga pengajarnya. Sebelum tahun 1958, sekolah Tionghoa berjumlah 2000 buah (Suryadinata 1978: 149–53) dan terdiri dari sekolah-sekolah yang pro-Taipei dan pro-Beijing. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan satu peraturan yang melarang warga negara Indonesia belajar di sekolah Tionghoa. Peraturan ini membawa pengaruh besar ke dalam masyarakat Tionghoa. Kira-kira 1.100 sekolah Tionghoa akibatnya harus diubah menjadi sekolah bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan t.t.: 38).

Pada tahun 1958 di Indonesia muncul kampanye anti-Guomintang (Kuomintang) yang didorong karena pemerintah Taipei dipandang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera. Semua sekolah Tionghoa yang bersangkutan dengan Taipei ditutup. Pada 1965, di Indonesia terjadi G-30-S, dan Beijing dianggap terlibat dalam kudeta itu sehingga semua sekolah Tionghoa yang pro-Beijing pun ditutup. Ini juga merupakan berakhirnya sejarah pendidikan Tionghoa di bumi Indonesia (Suryadinata 1978: 149–53).

Meskipun sejumlah sekolah khusus (Sekolah Nasional Proyek Khusus) telah didirikan oleh masyarakat Tionghoa pada tahun 1968, bahasa pengantar dan mata pelajarannya tidak berbeda dari sekolah nasional, terkecuali bahasa Cina sebagai mata pelajaran tambahan. Namun bahasa Tionghoa hanya boleh diajarkan di luar waktu sekolah. Meskipun demikian, sekolah-sekolah ini pun akhirnya ditutup pada 1975 (Suryadinata 1978: 153–9). Sebetulnya sejak zaman Orde Baru semua anak Tionghoa hanya bisa belajar di sekolah Indonesia. Ada orang tua yang ingin anak-anaknya belajar bahasa Tionghoa

dan memanggil guru les di rumah, tetapi praktik ini tidak digalakkan. Penguasaan bahasa Tionghoa anak-anak ini pun sangat terbatas. Ada juga orang tua yang mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri untuk belajar bahasa Tionghoa tetapi jumlahnya juga sangat kecil. Jadi, pada zaman Orde Baru anak-anak Tionghoa baik peranakan ataupun totok sama-sama mengalami Indonesianisasi.

Bukan saja sekolah Tionghoa diindonesianisasikan, bahkan sekolah Baperki (Ureca) di Jakarta juga diambil alih dan dijadikan Universitas Trisakti pada 1965. Komposisi mahasiswanya pun mengalami perubahan. Baperki bukan lagi universitas yang menampung pemuda Tionghoa belaka tetapi juga pribumi. Bahkan jumlah mahasiswa pribumi lebih besar daripada yang nonpribumi. Sebuah universitas swasta kecil di Jakarta, Universitas Tarumane-gara, kemudian berkembang menjadi universitas yang cukup besar dan menampung banyak mahasiswa Tionghoa.<sup>14</sup> Demikian pula beberapa universitas swasta di Jakarta dan Surabaya yang menerima mahasiswa Tionghoa. Dari lembaga-lembaga pendidikan Indonesia pemuda-pemudi Tionghoa mengalami proses sosialisasi di Indonesia.

Sebetulnya, penggunaan bahasa Tionghoa telah dibatasi di Indonesia. Ketika Orde Baru mengawali pemerintahannya, penguasa militer di Jawa Timur misalnya, memberikan instruksi kepada operator telepon bahwa semua percakapan dalam bahasa Tionghoa harus diputuskan.<sup>15</sup> Praktik itu kemudian tidak lagi dilakukan. Namun selama zaman Orde Baru bahasa Tionghoa tidak boleh dipamerkan dan semua nama toko harus dalam bahasa Indonesia. Di Glodok atau Pancoran, kadang-kadang masih terlihat beberapa aksara Cina tetapi umumnya diletakkan pada tempat-tempat yang tidak mencolok.<sup>16</sup>

Meskipun banyak surat kabar berbahasa Tionghoa yang diberedel untuk sementara pada awal 1960-an, surat-surat kabar itu dibolehkan terbit kembali sebelum masa Demokrasi Terpimpin berakhir. Akan tetapi, sejak Soeharto berkuasa, hanya sebuah koran "bahasa Cina" yang diizinkan untuk terbit yaitu *Yindunixiya Ribao* atau *Harian Indonesia*, sebuah harian pemerintah yang terbit di Jakarta. *Harian Indonesia* berjumlah 8 halaman, 4 buah halaman dalam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan seorang tenaga pengajar Universitas Tarumanegara, 1991. Namun ada beberapa universitas swasta yang persentase mahasiswa Tionghoanya besar, misalnya Universitas Kristen Petra di Surabaya. Keterangan diberikan oleh salah seorang pengajar pada universitas tersebut.

<sup>15</sup> Instruksi itu diberikan oleh Jenderal Soemitro, pada waktu itu menjabat komando divisi Brawijaya.

<sup>16</sup> Pada tahun 1990, pemerintah daerah Bandung pernah mengeluarkan instruksi bahwa semua huruf Cina di batu nisan kuburan Tionghoa harus dihapuskan. Tetapi kemudian, instruksi itu ditarik kembali (*Jakarta Post*, 29 Maret 1990).

bahasa Tionghoa dan sisanya dalam bahasa Indonesia. Banyak halaman memuat iklan dan berita atau kebijaksanaan pemerintah Indonesia. Banyak orang Tionghoa membacanya hanya untuk iklan, konon penghasilannya dari iklan sangat besar.<sup>17</sup> Meskipun *Harian Indonesia* boleh beredar secara bebas di Indonesia, surat kabar dan buku bahasa Cina yang terbit di luar negeri dilarang beredar.<sup>18</sup> Sejak pertengahan tahun 60-an, penerbitan bahasa Cina tidak boleh diimpor ke Indonesia. Untuk satu masa yang sangat panjang, buku atau majalah bahasa Inggris yang terdapat aksara Tionghoa pun dilarang.<sup>19</sup> Ada kalanya iklan-iklan beraksara Tionghoa dalam majalah-majalah berbahasa Inggris (misalnya *Far Eastern Economic Review*) dihitamkan sebelum diedarkan di pasaran Indonesia.

Pemerintah Soeharto menjalankan kebijaksanaan "buka pintu" dalam bidang ekonomi dengan menggalakkan penanaman modal asing. Banyak modal dari Singapura, Hong Kong dan Taiwan datang ke Indonesia. Meskipun penanam modal Taiwan sangat aktif, mereka baru berhasil membujuk pemerintah Soeharto untuk mengizinkan didirikannya sebuah sekolah Taiwan Cina untuk anak-anak warga negara Taiwan seusai Perang Dingin. Namun Tionghoa Indonesia tidak boleh sekolah di sana. Adanya penanam modal Tionghoa yang berbahasa Mandarin juga memberikan rangsangan untuk peranakan Tionghoa belajar bahasa itu. Normalisasi hubungan antara Jakarta dan Beijing juga menggalakkan berkembangnya bahasa Mandarin di Tanah Garuda. Tapi semua itu tidak membuat peranakan Tionghoa menjadi totok.

Kebijakan yang paling komprehensif untuk mengubah identitas Tionghoa di Indonesia adalah peraturan ganti nama. Pada 1961, ketika Sukarno masih berkuasa, peraturan ini sudah diumumkan, akan tetapi tidak dilaksanakan (Suryadinata 1978: 163). Pada 1966 setelah Soeharto berkuasa, peraturan ganti nama dikeluarkan lagi. Kali ini, prosedurnya disederhanakan dan banyak orang Tionghoa mengganti nama Tionghoanya, walaupun ganti nama ini tidak wajib. Namun, bagi kebanyakan orang Tionghoa, terutama pada pertengahan tahun 60-an, ada tekanan yang halus dari pemerintah untuk ganti nama, karena dengan ganti nama dianggap sebagai sebuah tingkah laku simbolik, semacam deklarasi orang Tionghoa bahwa mereka

<sup>17</sup> Wawancara dengan seorang bekas staf *Yinduxixiya Ribao*.

<sup>18</sup> Beberapa majalah dan surat kabar Cina terbitan Singapura dan Hong Kong dijual di Jakarta dan Surabaya secara gelap. Namun harganya jauh lebih mahal dari harga aslinya.

<sup>19</sup> Mantan Editor-in-Chief *Far Eastern Economic Review* (FEER) pernah mengeluh bahwa iklan di FEER selalu dicoret dengan tinta hitam. *Straits Times* terbitan Singapura juga dibolehkan beredar di Indonesia tanpa halaman dwibahasa.

"setia" kepada pemerintah Indonesia, atau mengidentitaskan diri dengan bangsa Indonesia dan "budaya Indonesia". Akan tetapi tidak semua Tionghoa mengganti namanya. Misalnya Liem Swie King (pemain bulutangkis) dan Almarhum Mr. Yap Thiam Hien (pengacara dan pembela hak asasi manusia) adalah dua contoh. Sebagian menggunakan dua nama, nama resminya (Indonesia) dan tidak resminya (Tionghoa). Namun orang Tionghoa generasi muda yang lahir sesudah tahun 1965 hampir semua memiliki nama Indonesia atau nama yang dianggap Indonesia (yakni yang bukan Cina). Menarik bahwa banyak Tionghoa mengambil "nama Indonesia" yang mencerminkan nama aslinya, seperti Salim untuk Liem, Wijaya atau Wibisono untuk Oei, Tano atau Tanzil untuk Tan, Chandra untuk Chan, dan Kusuma untuk Khoe. Akan tetapi Tionghoa yang berwarga negara asing tidak boleh mengganti nama Indonesia.

Kebijakan asimilasi ini mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat Tionghoa. Orang Tionghoa menjadi peranakan dan hanya berbahasa Indonesia, mereka menulis bahasa Indonesia baku, walaupun buah karya atau tulisan pengarang peranakan Tionghoa (misalnya Abdul Hadi WM, Marga T. dan Mira W.) tidak berbeda dengan karya para penulis pribumi. Tokoh-tokoh dalam karya sastra mereka tidak lagi terbatas pada peranakan Tionghoa. Novel mereka umumnya berlatar belakang perkotaan, bukan pedesaan. Jika penjualan buku-buku itu bisa dijadikan sebagai indikator, maka boleh dikatakan bahwa pembaca Indonesia, baik pribumi maupun nonpribumi, bisa mengidentifikasi diri mereka dengan novel-novel itu.<sup>20</sup>

### **Kebijakan tentang Agama Minoritas**

Kebijaksanaan yang mengizinkan bangsa Indonesia bebas beragama telah memungkinkan minoritas Tionghoa mempertahankan identitas etniknya melalui agama minoritas. Perlu ditegaskan bahwa kebijakan agama yang liberal ini bukan disebabkan oleh adanya orang Tionghoa. Kebijakan ini dibuat karena hakikat masyarakat pribumi sendiri. Indonesia adalah masyarakat majemuk dan banyak agama. Untuk mempertahankan kesatuan Indonesia, ideologi Pancasila, yang memberikan persamaan terhadap semua agama besar, telah diterapkan. Sebetulnya, pemerintah Indonesia sejak Sukarno sampai Soeharto telah menggunakan Pancasila untuk mencegah Indonesia menjadi negara Islam. Dalam konteks ini, agama selain Islam

---

<sup>20</sup> Mengenai sastra peranakan, periksa Leo Suryadinata, *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1996).

mendapat dukungan supaya ada keseimbangan atau keharmonian dalam kehidupan beragama. Melalui peraturan inilah orang Tionghoa bisa mempertahankan sekelumit "ketionghoaan"-nya.

Seperti semua agama besar di Indonesia, agama Khonghucu berasal dari luar negeri. Juga seperti agama lain, agama Khonghucu di Indonesia mengalami banyak perubahan. Jika diteliti, agama ini jelas mengandung unsur-unsur Budisme, Islam dan Indonesia. Agama Khonghucu di Indonesia merupakan agama yang terorganisasi. Organisasinya mirip agama Kristen dan Islam. Gereja Khonghucu diberi nama Lithang, kitab suci Khonghucu berjudul "Kitab Yang Empat", (dalam bahasa Indonesia), tuhan agama tersebut disebut Thian dan nabinya (di sini kelihatan pengaruh Islam) adalah Khonghucu sendiri. Pendeta agama Khonghucu dibagi atas tiga tingkat, yang masing-masing bernama Haksu, Bunsu dan Kausing. Seperti agama Kristen, agama Khonghucu juga memiliki nyanyian agama. Usai sembahyang, pemeluk agama Khonghucu mengucapkan "Sian Cay" (Amin), ucapan yang berasal dari Budisme. Kentara sekali bahwa agama ini sudah diindonesiakan. Agama Khonghucu semacam ini tidak akan diketemukan di daratan Cina atau negara lain.

Sebetulnya, sebelum peristiwa G-30-S pada 1965 telah dikeluarkan sebuah Penetapan Presiden (Penpres No. 1/1965) yang mengakui enam agama di Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu-Bali, Budisme dan Khonghucu. Agama yang terakhir umumnya dipeluk oleh orang Tionghoa.<sup>21</sup> Tidaklah mengherankan, pemerintah Orde Baru, yang ingin melebur orang Tionghoa menjadi pribumi, akhirnya tidak mengakui agama Khonghucu sebagai agama. Pada tahun 1979, Kabinet mengeluarkan instruksi, menyatakan agama Khonghucu bukan agama dan tidak lagi diakui sebagai agama resmi (*Apa dan Siapa* 1986: 325). Padahal, Khonghucuisme di Indonesia selama 70-80 tahun sudah berkembang menjadi agama yang terorganisasi (Suryadinata 1989: 63-73). Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu) menginginkan pemerintah Orde Baru mengakui agama Khonghucuisme tetapi sia-sia. Padahal, pada 1970-an, 0,8 persen penduduk Tionghoa di Indonesia beragama Khonghucu, sedangkan yang Buddhis berjumlah 0,9

---

<sup>21</sup> Mengenai agama Khonghucu di Indonesia, periksa Leo Suryadinata, 1989: 37-43.. Untuk diskusi tentang kebijakan pemerintah Indonesian terhadap agama minoritas Tionghoa, periksa Leo Suryadinata, "State and Minority Religions in Contemporary Indonesia: Government Policy towards Confucianism, Tridharma, and Buddhism," dalam buku Tsuneo Ayabe, penyunting, *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia* (Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1998), h. 5-24.

persen (BPS 1980: 97). Penduduk Tionghoa di Indonesia berjumlah 3 persen, jadi kira-kira 1,3 persen beragama lain (Katolik, Protestan dan Islam).

Meskipun agama Khonghucu tidak diakui sejak 1979, namun agama tersebut tidak dilarang. Orang Tionghoa masih bisa memeluk agama tersebut walaupun tidak bisa mengadakan perayaan secara terbuka. Bahkan di sekolah pun tidak diajarkan. Baru setelah Soeharto *lengser*, agama Khonghucu akan diakui lagi – tetapi sampai kini masih belum resmi.

### **Kebijakan Ekonomi**

Seperti yang telah diuraikan, kedudukan ekonomi orang Tionghoa cukup kuat, dan kekuatan ini bisa dijelaskan dengan perkembangan sejarah dan politik kolonial Belanda. Orang Tionghoa kini paling kuat dalam bidang bisnis dan keuangan.<sup>22</sup> Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan pribumiisme dalam bidang ekonomi untuk melemahkan kedudukan ekonomi orang Tionghoa dan membantu pedagang pribumi. Contoh yang paling dikenal adalah sistem Benteng pada awal 1950-an dan Peraturan Presiden No. 10 (PP 10) tahun 1959. Namun, perlindungan terhadap pedagang pribumi dan pemaksaan pedagang kecil Tionghoa keluar dari pedesaan tidak berhasil memperkecil peran orang Tionghoa dalam bidang ekonomi Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia harus membekukan pelaksanaan PP 10 untuk mengelakkan kehancuran ekonomi dan ketidakseimbangan politik (Suryadinata 1978: 134).

Mungkin yang sama pentingnya adalah hasil dari sistem benteng yang memunculkan pengusaha "Ali Baba". Ini merupakan aliansi antara pedagang Tionghoa dan pribumi yang memegang surat izin. Pedagang Tionghoa yang menjalankan bisnisnya dan membagi keuntungan dengan pribumi yang memegang surat izin.<sup>23</sup> Pada zaman Orde Baru, sistem ini berkembang menjadi sistem Cukong. Cukong adalah istilah Hokkian yang artinya majikan atau bos, tetapi dalam konteks Indonesia, istilah itu digunakan untuk menyebut seorang pedagang Tionghoa yang bekerja sama dengan elite yang berkuasa, termasuk presiden dalam perusahaan patungan. Umumnya mitra pribumi memberikan fasilitas dan perlindungan sedangkan orang Tionghoa

<sup>22</sup> Untuk diskusi tentang elite ekonomi Tionghoa, periksa Leo Suryadinata 1997: 25–74.

<sup>23</sup> Ada baiknya di sini saya mengutip komentar Prof Wang Gungwu tentang sistem "Ali Baba". Ia berpendapat bahwa "sebetulnya, tidaklah ada alasan bahwa organisasi semacam ini tidak bisa diperkembangkan menjadi satu alat membaurkan orang Tionghoa dan mengikutsertakan pribumi dalam usaha kapitalistis". Periksa Wang Gungwu, "Are Indonesian Chinese Unique? Some Observations". dalam buku J. A. C. Mackie, penyunting, *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Honolulu, University of Hawaii Press, 1976), h. 249.

memberikan modal dan menjalankan perusahaan tersebut (Suryadinata 1997: 33–8). Sistem Cukong ini dianggap tidak menguntungkan pribumi sehingga menimbulkan kritik yang pedas dari pihak pribumi terhadap pemerintah Orde Baru. Mereka sangat kritis terhadap sistem ini karena tidak ada pemindahan keterampilan. Di samping itu hanya orang yang berkuasa yang mencicipi hasilnya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sistem ini merupakan satu cara bagi pribumi mempelajari keterampilan mitranya yang di kemudian hari bisa membantu mereka menjadi pengusaha yang sukses.

Berhubung dengan protes yang timbul di antara kalangan pedagang pribumi dan kerusuhan anti-Tionghoa yang makin sering terjadi pada tahun 70-an, pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan politik pribumi kembali dalam bidang ekonomi. Untuk memperoleh bagian yang lebih besar bagi pribumi dalam ekonomi, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan pada tahun 1974 yang menentukna bahwa semua penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Banyak bidang bisnis yang tertutup bagi orang Tionghoa Indonesia. Dengan kata lain, surat izin baru tidak akan dikeluarkan lagi untuk pedagang nonpribumi. Peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan ini adalah Keppres No.14 yang dikeluarkan pada tahun 1979. Keppres ini kemudian disempurnakan dan menjadi Keppres No. 14A /1980 dan mewajibkan semua lembaga pemerintah dan kementerian memberikan keistimewaan kepada pedagang dan kontraktor pribumi (Himpunan Peraturan 1981: 94–5). Untuk proyek besar, patungan antara pribumi dan non-pribumi digalakkan tetapi pribumi harus memiliki andil 50 persen dan harus aktif dalam perusahaan tersebut. Karena kurangnya informasi, tidak diketahui berapa pedagang pribumi yang telah mendapat keuntungan dari peraturan yang baru itu. Namun yang kentara, banyak nonpribumi yang telah memperoleh mitra pribumi. Jadi peraturan ini tidak mengubah situasi yang sudah ada.

Lain dari zaman Sukarno yang menjalankan kebijakan berdikari dan melalaikan perkembangan ekonomi, zaman Soeharto ini memusatkan perhatian pada perkembangan ekonomi—yang sering disebut pembangunan—sebagai cara untuk melegitimasikan regim Orde Baru. Pintu Indonesia dibuka besar dan penanaman modal asing digalakkan. Etnik Tionghoa baik yang WNI ataupun yang asing dikerahkan untuk mensukseskan program ekonomi Orde Baru. Di bawah kebijakan ekonomi yang liberal ini, kedudukan ekonomi orang Tionghoa menguat. Mereka telah berkembang melampaui batas negara Indonesia dan masuk ke arena internasional. Di antara konglomerat yang berjumlah dua sampai tiga ratus orang, terdapat banyak pribumi, namun yang terbanyak adalah yang non-pribumi. Sebelum masa

krisis, majalah *Eksekutif* (Agustus 1995) misalnya memuat daftar 100 konglomerat dalam negeri yang terbesar di Indonesia, di antaranya hanya 20 orang pribumi, seorang India, dan sisanya (79) adalah orang Tionghoa. Ini sering dilihat sebagai gagalnya "pribumisasi" yang tujuannya memperlemah ekonomi orang Tionghoa. Namun dalam dekade terakhir Orde Baru, konglomerat yang bersangkutan dengan (keluarga) Presiden Soeharto, bertumbuh makin besar sehingga menjadi sorotan media internasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kelompok yang menjalin kolusi, korupsi dan nepotisme inilah yang sebetulnya menguasai ekonomi Indonesia, bukan orang-orang Tionghoa kelas menengah.

Meskipun demikian, tidak bisa disangkal bahwa kedudukan ekonomi nonpribumi menguat dalam zaman Orde Baru, terutama dalam bidang perdagangan, yang diperkirakan 70 persen dikuasai pedagang Tionghoa. Ini merupakan akibat dari kebijaksanaan pemerintah Orde Baru yang menjuruskan orang Tionghoa ke bidang ekonomi. Kebijakan ini merupakan keputusan yang dibuat pada Seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung pada 1966, di mana ditetapkan bahwa orang Tionghoa harus dicegah masuk ke bidang lain, terutama ke bidang politik, karena pemimpin militer tidak percaya kepada orang Tionghoa sebagai sebuah kelompok.<sup>24</sup> Dengan membatasi orang Tionghoa di bidang ekonomi, elite yang berkuasa merasa bahwa pemerintah bisa lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Mungkin juga kebijakan ini berhubungan dengan keputusan pemerintah Orde Baru untuk menekankan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dengan menyalurkan orang Tionghoa ke bidang tersebut supaya ekonomi Indonesia bisa berkembang pesat. Namun banyak pengamat politik berpendapat bahwa orang Tionghoa sengaja dibatasi dalam bidang ekonomi sehingga kalau terjadi apa-apa mereka bisa dijadikan target yang gampang. Ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah sengaja memupuk orang Tionghoa dalam bidang ekonomi supaya mereka gampang diajak kerja sama bahkan diperas, sedangkan kaum pribumi sukar untuk diperlakukan demikian karena mereka mempunyai kedudukan politik yang kuat.

Mungkin semua itu ada benarnya, apalagi alasan yang terakhir. Akibat dari kebijakan Orde Baru, segelintir pengusaha yang terkait dengan penguasa besar bermunculan yang dikenal sebagai konglomerat. Kesenjangan masyarakat makin kentara dan jurang antara orang Tionghoa dan pribumi, jikalau bukan di seluruh Indonesia, sekurang-kurangnya di Jawa dan Sumatera,

---

<sup>24</sup> Dalam seminar di Bandung, masalah Tionghoa itu telah dibahas dan banyak keputusan yang telah diambil. Saya pikir bahwa keputusan depolitisasi orang Tionghoa ditetapkan pada waktu itu.

semakin besar. Ini telah menanamkan bibit kerusuhan antarras. Ada sebagian pengusaha pribumi ingin mencontoh Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy, 1971–1990) di Malaysia untuk membatasi kekuatan ekonomi orang Tionghoa dan mempertinggi kedudukan ekonomi pribumi secara paksa, namun kabarnya anjuran ini ditolak. Mungkin karena hal itu tidak cocok, mungkin juga pemerintah Soeharto tidak mau melihat kebangkitan sebuah kelas wiraswasta pribumi yang kuat, yang akhirnya akan mengancam regim Orde Baru yang autoritarian. Sebagai penggantinya, pemerintah Soeharto mengimbau konglomerat membantu perusahaan lemah dan menjual 1 sampai 25 persen dari sahamnya kepada koperasi.<sup>25</sup> Namun program semacam itu tidak berhasil mengatasi masalah ekonomi yang parah dan jurang ekonomi-sosial yang membesar. Krisis moneter yang timbul pada bulan Juni 1997 akhirnya melanda beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis ini jugalah yang akhirnya menguak ketidakberesan ekonomi dan politik Indonesia yang akhirnya memaksa Soeharto berhenti sebagai presiden Indonesia.

### Era Pasca-Soeharto

Sesaat Soeharto *lengser*, Dr. B. J. Habibie diangkat sumpah menjadi presiden Indonesia. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Habibie terhadap orang Tionghoa? Apakah ada perbedaan dengan Orde Baru?

Di bidang politik, Habibie telah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berorganisasi dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Partai-partai baru muncul seperti jamur. Orang Tionghoa juga mengambil kesempatan ini untuk mendirikan partai etnik. Ini berbeda dengan zaman Orba di mana jumlah partai dibatasi dan organisasi etnik Tionghoa dilarang. Dua partai Tionghoa yang paling awal dibentuk adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) dan Partai Pembauran Indonesia (Parpindo). Tidak lama muncul pula Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) yang dipimpin oleh seorang Tionghoa. Namun ketiga "Partai Tionghoa" ini mengalami banyak tantangan. Parti tidak ikut Pemilu karena kurang cabangnya, Parpindo akhirnya mengubah diri menjadi sebuah organisasi biasa sedangkan PBI berhasil ikut serta dalam Pemilu Juni 1998. Namun sebetulnya PBI adalah partai multietnik yang dipimpin oleh etnik Tionghoa, bukan partai etnik Tionghoa.

<sup>25</sup> Mengenai pertemuan Soeharto dengan konglomerat Tionghoa, periksa "Tak Cukup dengan Ucapan Terimakasih", *Tempo*, 10 Maret 1990, h. 20-23; untuk respons konglomerat, periksa *Straits Times*, 30-31 Maret 1990.

Banyak tokoh Tionghoa yang tidak setuju mendirikan partai etnik Tionghoa. Mereka lebih condong bergabung dengan partai yang dibentuk oleh pribumi. Ada juga yang tidak mau mendirikan partai politik tetapi membentuk kelompok penekan (*pressure groups*) untuk memperbaiki kedudukan minoritas Tionghoa. Yang agak dikenal adalah Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (Baijiaxing Shiehui) dan Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia. Berbeda dengan zaman Orde Baru, Habibie rupanya ingin mengikutsertakan etnik Tionghoa dalam bidang politik. Konon ia pernah mengundang Kwik Kian Gie menjadi Menteri Penanaman Modal Asing dalam kabinetnya, akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Kwik karena Habibie masih tidak mengakui PDI Perjuangan yang diketuai Megawati (*Kompas*, 30 Mei 1998).

Dalam bidang hukum dan budaya yang bersangkutan dengan etnik Tionghoa, pemerintah Habibie juga menjanjikan reformasi. Menteri Urusan Wanita (Tuti Alawiyah) memakai kata "suku Tionghoa" untuk menyebut WNI keturunan Cina (*Republika*, 22 Juli 1998) dan Habibie sendiri pun menggunakan kata tersebut. Kata "Cina" memang kontroversial dan tidak disukai oleh banyak orang Tionghoa, terutama generasi tua, yang menganggap istilah tersebut mengandung penghinaan.<sup>26</sup> Menteri Kehakiman Muliadi juga berjanji menghapuskan diskriminasi hukum terhadap warga negara Indonesian keturunan Tionghoa—misalnya, kode dalam kartu penduduk akan dihapus, orang Tionghoa dibolehkan masuk bidang-bidang yang dulu tertutup, dan sebagainya. Menteri Agama Malik Fadjar mengatakan bahwa agama Khonghucu akan diakui kembali. Bahkan bahasa Tionghoa sebagai bahasa asing akan diajarkan di sekolah. Semua janji itu menunjukkan bahwa regim reformasi Habibie ingin merangkul minoritas Tionghoa.

Namun Habibie mempunyai citra yang dianggap kurang simpatik terhadap orang Tionghoa. Dalam bidang ekonomi, misalnya, ia mengecam orang Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia. Ketika ia masih memegang jabatan wakil presiden pada bulan Maret, ia diwawancarai oleh surat kabar Jepang dan menuduh penduduk Tionghoa yang hanya berjumlah 3 persen di Indonesia menguasai 90 persen ekonomi Indonesia (*Staitis Times*, 13 Maret 1998). Ia mengatakan bahwa hal itu sangat kerdil dan ketidakseimbangan itu harus dikoreksi dengan segera. Mengenai kekuatan ekonomi orang Tionghoa,

---

<sup>26</sup> Mengenai arti Cina dan Tionghoa dan penggunaannya di Indonesia, baca Charles Coppel dan Leo Suryadinata, "The Use of the terms Tjina and Tionghoa in Indonesia: An Historical Survey", *Paper on Far Eastern History* (Australian National University), No. II (September 1970) h. 97-118.

sudah lama menjadi bahan perdebatan. Di sini bukan tempatnya untuk berbicara panjang lebar, tetapi yang penting adalah persepsi Habibie mengenai posisi orang Tionghoa dan keinginannya untuk mengubahnya dengan cepat.

Setelah menjadi presiden, rupanya Habibie mempunyai persepsi yang sama. Secara terbuka ia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh dikuasai oleh satu golongan etnik, yakni etnik Tionghoa. Sebetulnya ketika kerusuhan bulan Mei 1997, banyak orang Tionghoa yang mengungsi ke luar negeri. Di samping itu, mereka juga membawa modalnya ke luar negeri. Habibie mengimbau mereka untuk kembali. Setelah situasi mulai pulih, hampir semua orang Tionghoa kembali. Namun karena keadaan ekonomi masih belum mantap, banyak modal masih mangkal di luar negeri. Ketika ditanya *Washington Post*, kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahnya untuk mengimbau orang Tionghoa, Habibie berkata bahwa tanpa orang Tionghoa, Indonesia tidak akan musnah. Kalau mereka tidak ingin pulang, kedudukan mereka akan digantikan oleh orang lain (*Jakarta Post*, 22 Juli 1998). "Orang lain" ini diartikan pribumi atau nonpribumi yang bukan Tionghoa. Keesokan harinya kurs rupiah jatuh 5,7 persen.

Sebetulnya, Habibie berada dalam keadaan dilema. Sebagai presiden Indonesia dan untuk mengatasi krisis ekonomi, ia memerlukan bantuan orang Tionghoa dan *goodwill* dari masyarakat internasional. Akan tetapi ia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya propribumisasi dalam bidang ekonomi, mungkin untuk mendapat sokongan pribumi. Akibatnya ia sering mengutarakan perkataan yang saling bertentangan. Kadang kala, perkataannya tidak menguntungkan bagi kestabilan ekonomi dan politik Indonesia.

#### KESIMPULAN

Hubungan Negara (pemerintah) di Indonesia dan minoritas Tionghoa sangat erat dan kebijakan pemerintah dalam taraf yang tinggi menentukan wajah masyarakat itu sendiri. Kebijakan negara kolonial dan negara Indonesia merdeka memberikan dampak yang besar terhadap peran ekonomi minoritas Tionghoa di Indonesia. Orang Tionghoa sebagai satu kelompok etnik menjadi semakin kuat dalam bidang ekonomi setelah Indonesia merdeka. Namun tidak berarti bahwa mereka menguasai ekonomi negara Indonesia. Di zaman kolonial, Belanda dan negara Baratlah yang menguasai ekonomi Indonesia, dan setelah merdeka, negara dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan MNC (Multi-National Corporations)-lah yang menguasai ekonomi Indonesia. Elite politik pribumi dan elite ekonomi nonpribumi juga berpengaruh besar. Tetapi mayoritas Tionghoa tidak bisa digolongkan dalam

kelas yang sama. Namun, tidak bisa disangkal, sebagai satu kelompok, peran ekonomi mereka dalam bidang perdagangan dan keuangan sangat dominan.

Mengenai identitas etnik, pemerintah kolonial telah melestarikan keterpisahan orang Tionghoa, sedangkan pemerintah Indonesia berusaha mengindonesiakan orang Tionghoa dengan banyak cara. Kebijakan menghentikan masuknya imigran Tionghoa baru dengan sendirinya membuat kelompok Tionghoa di Indonesia makin bersifat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berbau asimilasi juga telah membuat anak totok Tionghoa menjadi peranakan dan peranakan menjadi lebih Indonesia. Namun kebijakan yang menyalurkan orang Tionghoa ke bidang ekonomi, pembedaan antara pribumi dan nonpribumi, dan penandaan kartu penduduk telah melestarikan identitas etnik orang Tionghoa. Pluralisme agama yang dijamin oleh Pancasila juga membuat orang Tionghoa bisa mempertahankan identitas etniknya.

Minoritas Tionghoa di Indonesia sering dianggap sebagai kelompok yang homogen, padahal kelompok yang heterogen. Namun, sebagai minoritas, orang Tionghoa di Indonesia masih sangat kentarā. Secara kebudayaan, peranakan Tionghoa (bukan totok) telah cukup terbau, akan tetapi mereka masih tidak diterima sebagai sebagian dari bangsa Indonesia, karena negara mengartikan "bangsa Indonesia" secara sempit. Hanya pribumilah yang bisa diterima sebagai bangsa Indonesia. Padahal pada masa yang lalu, banyak pemimpin Indonesia yang pribumi berpendapat bahwa konsep bangsa itu adalah konsep budaya dan politik, bukan ras. Pada 1963 Sukarno pernah mencetuskan konsep bangsa Indonesia yang majemuk. Ia mengatakan bahwa Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak... dan suku peranakan Tionghoa. Sayangnya konsep semacam itu telah dicampakkan oleh pemerintah Orde Baru. Konsep bangsa yang realitis merupakan salah satu kunci pemecahan "masalah Tionghoa" di bumi Garuda.

Masalah tersebut juga terdapat aspek ekonominya dan sistem ekonomi yang lebih adil penting dalam penyelesaian masalah itu. Masalah identitas ini penting untuk diselesaikan. Namun masalah identitas ini sekarang lebih kompleks dan lebih sukar untuk diselesaikan karena banyak faktor baru yang harus diperhitungkan seperti bangkitnya etnisitas di seluruh dunia dan kebangkitan RRC sebagai kekuatan ekonomi. Kedua faktor ini mungkin akan memperlambat proses integrasi orang Tionghoa di Indonesia. Di samping itu, perkembangan di Indonesia yang berbau rasialisme baru-baru ini juga mengeruhkan situasi. Masih harus dilihat kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah selanjutnya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

DAFTAR ACUAN \*

- Bachtiar, Harsya W. (1987), "Intergrasi Nasional Indonesia", dalam *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- BPS (1980), *Buku Statistik Indonesia 1979/1980*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (t.t.) *Pengawasan Pengadjaran Asing*, Jakarta.
- Gouw Giok Siong (1960), *Warga Negara dan Orang Asing*. Djakarta: Keng Po.
- Hoetink B. (1917), "So Bing Kong: Het eerste hoofde der Chinezen te Batavia, 1619—1636," *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde (BKI)*, 73.
- Kwee Tek Hoay (1938), "Atsal Moelanja Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di Indonesia," *Moestika Romans*. Vol. 7, No. 107, November.
- Liem Twan Djie (1947), *De distribueerende tusschenhandel der Chineezen op Java*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Skinner, G. William (1963), "The Chinese Minority", dalam Ruth T. McVey (ed.), *Indonesia*. New Haven: Yale University Press.
- Soekanto (1954), *Dari Djakarta ke Djajakarta*. Djakarta.
- Suryadinata, Leo (1971a), *Pre-War Peranakan Chinese Press in Java: A Preliminary Survey*. Ohio University Southeast Asia Program.
- (1971b), "Pre-War Indonesian Nationalism and Peranakan Chinese," *Indonesia*, No. 11, April.
- (1978), *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China: The Study of Perceptions and Policies*. Kuala Lumpur: Heinemann Asia.
- (1981a), *Peranakan Chinese Politics in Java, 1917—1942*. Singapura: Singapore University Press [edisi kedua].
- (1981b), *Eminent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Singapura [edisi revisi].
- (1989), *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- (1997), *The Culture of the Chinese Minority in Indonesia*. Singapura: Times Editions.
- Wertheim, W. F. (1956), *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague: W. van Hoeve
- Williams, Lea E. (1960), *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan-Chinese Movement in Indonesia 1900—1916*. Glencoe, Illinois: Free Press, h. 31.
- Wong C. S. (1963), *A Gallery of Chinese Kapitans*. Singapura: Dewan Bahasa dan Kebudayaan Kebangsaan.

---

\* Tidak termasuk acuan yang telah disebutkan secara lengkap dalam catatan kaki.